

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Revolusi industri yang berkembang saat ini banyak memberikan perubahan dalam perekonomian nasional terutama semakin ketatnya dunia persaingan bisnis, hal ini dapat dilihat dari para pelaku ekonomi baik domestik maupun asing yang tidak ragu-ragu untuk melakukan aktivitas usahanya di Indonesia.

Korporasi atau perusahaan merupakan salah satu faktor yang memiliki peran sentral dalam perekonomian suatu negara. Sebab selain menjalankan fungsi-fungsi produksi dan distribusi barang dan jasa, korporasi juga terlibat langsung dalam proses alokasi sumber daya yang bersifat ekonomis bagi masyarakat. Peran ini sangat penting mengingat keberadaan sumber daya ekonomis yang sangat terbatas dan oleh karenanya harus dapat dialokasikan seoptimal mungkin **(Sarafina & Saifi, 2017)**.

Perusahaan akan saling berlomba untuk memaksimalkan kinerja perusahaannya, karena kinerja perusahaan yang baik akan menarik investor untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut. Adanya tambahan modal dari investor akan menciptakan prospek yang lebih besar bagi masa depan perusahaan. Semakin besar modal yang dikeluarkan perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha, maka semakin besar pula ekspektasi keuntungan yang didapatkan perusahaan.

Banyak perusahaan yang *go public* demi mendapatkan modal yang lebih besar dari pihak eksternal perusahaan dengan cara menjual saham perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan harus menunjukkan kinerja yang baik agar pihak eksternal (investor) mau menanamkan modal pada perusahaan (**Widagdo & Chariri, 2014**). Bukti yang menunjukkan kinerja perusahaan adalah laporan keuangan perusahaan yang baik dan sesuai standar yang berlaku, yaitu PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat diketahui melalui dua sisi yaitu : sisi internal perusahaan dengan cara melihat laporan keuangan dan sisi eksternal perusahaan yaitu melihat nilai perusahaan dengan cara menghitung kinerja keuangan perusahaan. Indikator yang sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan adalah melalui rasio keuangan. Rasio yang sering digunakan adalah *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan secara menyeluruh. ROA dapat menunjukkan efisiensi dari aset yang digunakan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik pula kinerja perusahaan.

Ada banyak cara yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan untuk dapat berkembang dan mendapatkan keuntungan yang maksimal, salah satu diantaranya yaitu dengan memiliki tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). *Corporate governance* mengacu pada aturan, proses, dan hukum dimana perusahaan dioperasikan, dikontrol, dan diatur. Hal ini menjelaskan tanggung jawab dari partisipan perusahaan seperti pemegang saham, direksi,

manajer dan pemangku kepentingan lainnya, serta aturan dan prosedur untuk membuat keputusan perusahaan (**Muchtar & Darari, 2013**).

Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik berkaitan dengan upaya menarik investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan berdampak pada kesejahteraan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) (**Ferial, Suhandak, & Handayani, 2016**).

Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan (**Sukandar & Rahardja, 2014**). Oleh karena itu, baik perusahaan *public* maupun tertutup harus memandang *Good Corporate Governance* (GCG) bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.

IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*) mendefinisikan konsep *corporate governance* sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Lebih lanjut IICG mendefinisikan pengertian mengenai *corporate governance* yang baik sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh

organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Definisi tersebut mengandung kesimpulan bahwa *corporate governance* merupakan serangkaian mekanisme, yang mana mekanisme tersebut terdiri dari struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ-organ dalam perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berbagai penelitian mengenai pengaruh dari mekanisme *corporate governance* yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya terdapat hasil yang berbeda-beda antara hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Seperti penelitian yang dilakukan oleh **(Wehdawati & Swandari, 2015)** menyimpulkan bahwa menunjukkan bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan ROE, sedangkan variabel jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan size perusahaan tidak berpengaruh terhadap ROA dan ROE. Variabel jumlah komite audit tidak digunakan dalam analisis karena data bernilai konstan.

Penelitian yang dilakukan oleh **(Rehman & Shah, 2013)** pada perusahaan sektor non-keuangan pada tahun 2005-2009 menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, baik secara akuntansi maupun *market based*, komisaris independen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan secara *market based* dan tidak

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan secara akuntansi, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh secara negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan secara akuntansi.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh **(Tertius & Christiawan, 2015)** menunjukkan hasil secara simultan, dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan mempengaruhi ROA. Secara parsial, dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan, komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ROA.

Permasalahan *corporate governance* mencuat menjadi perhatian dunia setelah terungkapnya skandal dan bentuk korupsi korporasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat yang melibatkan perusahaan Enron. Perusahaan Enron bergerak dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas, kertas dan komunikasi. Skandal ini juga melibatkan salah satu kantor akuntan publik *big five* pada saat itu, yaitu Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen.

Skandal Enron dilakukan oleh pihak eksekutif perusahaan dengan melakukan *mark-up* laba perusahaan dan menyembunyikan sejumlah utangnya. Kasus ini kemudian menyeret keterlibatan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen yang merupakan auditor Enron dan mengakibatkan Arthur Andersen ditutup secara global. Skandal yang dilakukan sejumlah perusahaan seperti Enron, Tyco International, Adelphia, Pergrine Systems, dan WorldCom menyebabkan

lembaga regulator seperti OJK dan BEI harus menekankan pentingnya penegakan hukum yang efektif.

Di Indonesia sendiri, konsep *Good Corporate Governance* mulai diperkenalkan pada tahun 1999 setelah pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). (KNKG, 2006) mengeluarkan pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia pada tahun 2000 yang kemudian direvisi pada tahun 2006. Isi dari pedoman tersebut adalah setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan *Good Corporate Governance* dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh KNKG dalam laporan tahunannya (Widagdo & Chariri, 2014).

Terbukanya skandal keuangan PT. Lippo dan PT. Kimia Farma pada tahun 2001 memunculkan *corporate governance* sebagai salah satu isu sentral dalam perekonomian Indonesia. Skandal ini adalah imbas dari krisis keuangan Indonesia pada tahun 1998 dan krisis ekonomi Asia satu tahun sebelumnya. Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997, yang sebagian besar disebabkan oleh krisis ekonomi panjang yang melanda Jepang pada tahun 1990-an, memberikan dampak negatif terhadap kinerja ekonomi negara-negara di Asia Timur (Marn & Romuald, 2012).

Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik di Indonesia terbilang masih lemah, hal ini dikarenakan belum adanya kesadaran akan suatu nilai dan praktek dalam menjalankan kegiatan bisnis. Tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan (Ferial, Suhandak, & Handayani, 2016).

Rendahnya *corporate governance*, hubungan investor yang lemah, kurangnya tingkat transparansi, ketidakefisienan dalam laporan keuangan, dan masih kurangnya penegakan hukum atas perundang-undangan dalam menghukum pelaku dan melindungi pemegang saham minoritas, menjadi pemicu dan alasan beberapa perusahaan di Indonesia runtuh.

Tabel 1.1

Corporate Governance in Asia Market Category Scores Tahun 2016

%	2012	2014	2016	Change 2014 vs 2016	Rules & Practic	Enforc ement	Politic al	Accoun ting & Audit	CG Culture
1. Singapura	69	64	67	(+3)	63	63	67	87	55
2. Hong Kong	66	65	65	-	63	69	69	70	53
3. Japan	55	60	63	(+3)	51	63	69	75	58
4. Taiwan	53	56	60	(+4)	54	54	64	77	50
5. Thailand	58	58	58	-	64	51	45	77	50
6. Malaysia	55	58	56	(-2)	54	54	48	82	42
7. India	51	54	55	(+1)	59	51	56	58	49
8. Korea	49	49	52	(+3)	48	50	53	70	41
9. China	45	45	43	(-2)	38	40	36	67	34
10. Philipina	41	40	38	(-2)	35	19	41	65	33
11. Indonesia	37	39	36	(-3)	35	21	33	58	32

Sumber : *Asian Corporate Governance Association 2016*

Berdasarkan hasil survei dari *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa Indonesia berada diperingkat terendah setelah China dan Philipina. Meskipun skor *corporate governance* Indonesia tahun 2014 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016, kenyataannya Indonesia masih tetap berada di urutan terbawah diantara negara-negara di Asia. Faktor-faktor penyebabnya adalah pelaksanaan dan peraturan serta budaya *corporate governance* yang masih berada di titik paling rendah dibandingkan dengan negara lainnya yang sedang tumbuh di Asia. Fakta ini menunjukkan

bahwa implementasi GCG di Indonesia membutuhkan perhatian yang lebih komprehensif agar semakin membaik (**Wehdawati & Swandari, 2015**).

Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, dimana didalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham (*public*) sebagai pemilik perusahaan dan kreditor sebagai penyandang dan eksternal. Sistem *corporate governance* yang baik akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan.

Penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* dalam perusahaan tidak semudah memahami konsepnya, penyimpangan masih bisa muncul akibat tidak adanya integritas dari manajemen perusahaan. Timbulnya ketidaktaatan, kesalahpahaman, konflik peran, serta fungsi pengambilan keputusan diantara pengelola perusahaan, dan bahkan manipulasi keuangan oleh pihak direksi maupun manajer merupakan penyimpangan yang dapat muncul dalam proses penerapan. Keberhasilan penerapan *corporate governance* tidak hanya bergantung pada prinsip dan peraturan yang ada, melainkan bergantung pada integritas dan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Etika dan budaya kerja, serta prinsip-prinsip kerja profesional memegang peranan penting dalam penerapan *corporate governance* (**Widagdo & Chariri, 2014**).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia masih sangat lemah, dikarenakan belum adanya kesadaran akan suatu nilai dan praktek dalam menjalankan kegiatan bisnis. Tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan.
2. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia membutuhkan perhatian yang lebih komprehensif agar semakin membaik kedepannya.
3. Kepentingan manajemen (*agent*) dan kepentingan pemilik (*principal*) yang tidak sejalan sehingga menimbulkan konflik agensi.
4. Revolusi industri memunculkan persaingan antar perusahaan, sehingga perusahaan berusaha untuk memaksimalkan kinerja perusahaan untuk dapat menarik investor.
5. Semakin besar modal yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha, maka semakin besar ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh.

6. Perusahaan publik mendapatkan modal dari pihak eksternal dengan cara menjual saham, sehingga perusahaan harus menunjukkan kinerja yang baik agar investor mau menanamkan modal.
7. Jumlah dewan direksi yang terlalu banyak akan berakibat pada kurangnya diskusi antara dewan direksi satu dengan yang lainnya, selain itu untuk mengumpulkan pendapat dalam satu kelompok yang besar akan memakan waktu yang lama, sehingga kuranglah kekompakan dewan direksi tersebut.
8. Jumlah dewan direksi akan menyebabkan besarnya kecurangan pada laporan keuangan dan berkurangnya kemampuan dewan direksi dalam memonitor sehingga berbagai masalah akan ditimbulkan seperti dalam hal koordinasi, komunikasi dan pembuatan keputusan.
9. Dewan komisaris yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, maksudnya memiliki hubungan bisnis, dan hubungan kekeluargaan dengan pihak direksi atau komisaris lain sehingga tujuan pengawasan terhadap direksi tidak berjalan sesuai dengan prinsip GCG.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang diteliti lebih terfokus pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Kinerja perusahaan sebagai variabel dependen dan ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial sebagai variabel independen, serta ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

2. Perusahaan yang akan diteliti adalah perusahaan publik khususnya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2014-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2018?
2. Adakah pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2018?
3. Adakah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2018?
4. Adakah pengaruh ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2018?
5. Adakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2018?
6. Adakah pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2018?
7. Adakah pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2018?

8. Adakah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2018?
9. Adakah pengaruh ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2018?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2018.
4. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan manajerial secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2018.

5. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2018.
6. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2018.
7. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2018.
8. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2018.
9. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan manajerial secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2018.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki manfaat positif bagi :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoritis dibangku perkuliahan, terutama ilmu pengetahuan tentang Manajemen Keuangan, sehingga penulis mendapatkan pengalaman baru dalam berpikir dan juga dapat menambah daya analisis penulis.

2. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta merupakan perwujudan dari pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau alat replikasi bagi peneliti dimasa yang akan datang, yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pemikiran bagi masyarakat mengenai pentingnya peranan dan penerapan *corporate governance* dilingkungan perusahaan, karena *corporate governance* menawarkan solusi secara legal dengan mengatur sistem tata kelola perusahaan dan pengungkapannya.